

Mengungkapkan Tata Kelola Dana Punia Pura Berbasis Teknologi Digital (Studi Pada Pura Tanah Kilap Denpasar)

Kadek Ely Shima Parwati⁽¹⁾
I Made Endra Lesmana Putra⁽²⁾
Ni Putu Ayu Kusumawati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia Denpasar
 e-mail: kadekelyshimaparwati@gmail.com

ABSTRACT

The temples as religious and social institutions in Bali, play a crucial role in managing congregational funds sourced from punia funds, community dues, and voluntary donations. Conventional financial management has the potential to create accountability, transparency, and efficiency issues. With the advancement of digital technology, there is an opportunity to improve temple financial governance through a more structured and transparent recording and reporting system. This study aims to explore in-depth temple financial governance practices and the adoption of digital technology in financial management at Tanah Kilap Temple in Denpasar. The study employed a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation with temple administrators and related parties. The results indicate that digitalizing financial management has the potential to improve recording accuracy, reporting transparency, and congregational trust. However, its implementation still faces challenges such as limited human resources, infrastructure readiness, and adaptation to conventional work cultures. This research is expected to provide conceptual and practical contributions to the development of accountable, digital-based temple financial governance, particularly in Hindu religious institutions in Bali.

Keywords: Governance; Technology; Temple

PENDAHULUAN

Pura Tanah Kilap di Denpasar merupakan salah satu pura besar yang memiliki aktivitas keagamaan cukup padat dan melibatkan banyak krama serta pengunjung. Sebagai pura yang cukup dikenal di Kota Denpasar, kompleksitas kegiatan dan transaksi keuangan tentu relatif tinggi sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Hal ini menjadikan Pura Tanah Kilap sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana tata kelola keuangan dapat diintegrasikan dengan teknologi digital. Seiring meningkatnya partisipasi umat dalam kegiatan keagamaan, kebutuhan atas sistem keuangan yang transparan menjadi semakin penting. Transparansi tidak hanya untuk mencegah kesalahpahaman, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara pengurus pura dan umat (Hermawan & Musmini, 2021).

Digitalisasi pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pencatatan yang lebih akurat dan terstandarisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang mengharuskan setiap lembaga yang mengelola dana masyarakat untuk menyampaikan laporan secara jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Dasila, 2025). Penelitian kualitatif

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana tata kelola keuangan pura dijalankan dan bagaimana teknologi digital mulai diadopsi dalam proses tersebut. Dengan mengambil studi pada Pura Tanah Kilap Denpasar, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap mengenai peluang, tantangan, dan praktik nyata digitalisasi tata kelola keuangan pada lembaga keagamaan Hindu di Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori utama yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi informasi dalam suatu organisasi (Davis, 1989). Dalam tata kelola keuangan pura, penerapan teknologi digital hanya akan efektif apabila pengurus pura memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat dan kemudahan sistem yang digunakan. Persepsi kegunaan tercermin ketika pengurus merasakan bahwa sistem digital membantu meningkatkan transparansi, mempercepat pelaporan, dan memudahkan penyusunan pertanggungjawaban dana punia dan iuran krama (Hermawan & Musmini, 2021; Davis, 1989). Dengan demikian, pemahaman terhadap TAM penting untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan dan kesediaan pengurus pura dalam mengadopsi tata kelola keuangan berbasis teknologi digital, sehingga upaya digitalisasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memperhatikan aspek perilaku dan persepsi pengguna.

Tata Kelola

Tata kelola merupakan sistem pengaturan, pengendalian, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam aktivitas pengelolaan suatu organisasi (Handajani et al., 2021). Tantangan dalam tata kelola banyak ditemukan pada institusi yang belum memiliki pedoman standar atau minim sumber daya manusia dalam bidang administrasi finansial (Illa & Violita, 2025). Ketergantungan pada mekanisme tradisional seperti pencatatan manual dan pengarsipan fisik sering menyebabkan keterlambatan pelaporan serta peningkatan risiko kehilangan data keuangan. Proses yang lambat dapat menurunkan kredibilitas institusi di mata masyarakat penyumbang. Untuk itu, penguatan kapasitas tata kelola perlu dilakukan melalui regulasi internal, peningkatan kompetensi pengelola, dan pemanfaatan teknologi modern. Sistem pencatatan digital, pelaporan otomatis, hingga dashboard keuangan real-time terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen keuangan organisasi.

Tata Kelola Dana Punia Berbasis Digital

Tata kelola dana punia berbasis digital adalah sistem manajemen keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan keuangan secara terstruktur. Sistem berbasis digital mampu menyediakan alur keuangan yang terdokumentasi, sehingga setiap pemasukan dan pengeluaran terekam secara detail dan minim manipulasi (Arianto & Gunawan, 2024). Tantangan terbesar dalam penerapan tata kelola dana punia berbasis digital terdapat pada lembaga tradisional yang selama ini mengandalkan sistem manual. Perubahan kebiasaan dan adaptasi terhadap teknologi memerlukan waktu, pelatihan, dan pembaruan pola pikir. Selain itu, lembaga harus memastikan kesiapan perangkat keamanan digital untuk mencegah pencurian data dan penyalahgunaan akses.

Dana Punia

Dana punia merupakan bentuk persembahan sukarela dari umat Hindu yang diberikan di pura sebagai wujud bhakti, penghormatan, dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan (Pasaribu et al., 2025). Tradisi Hindu, dana punia memuat unsur keyakinan, ketulusan, dan kepercayaan umat kepada pengurus pura. Karena menyangkut unsur religius dan kepercayaan, transparansi pengelolaan dana menjadi faktor penentu keberlanjutan kegiatan keagamaan di pura. Pelaporan penggunaan dana yang jelas menciptakan hubungan harmonis antara umat dan pengurus. Ketika transparansi terjaga, partisipasi umat dalam memberikan punia akan meningkat.

Penerapan Digitalisasi di Lembaga Keagamaan

Digitalisasi di lembaga keagamaan merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta pelayanan kepada umat (Sedana &

Permana, 2025). Digitalisasi dapat menjadi kekuatan baru dalam penguatan manajemen lembaga keagamaan. Digital tidak hanya dipahami sebagai modernisasi teknologi, tetapi sebagai sarana mendukung nilai dasar keagamaan: pelayanan, ketulusan, dan kebermanfaatan bagi umat. Ketika lembaga keagamaan mampu mengelola digitalisasi secara tepat, maka spiritualitas dan pengelolaan organisasi dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada pura-pura di Bali, dengan fokus utama studi pada Pura Agung Tirtha Bhuana (Pura Tanah Kilap), Denpasar Selatan. Namun, ruang lingkup pembahasan diperluas pada konteks penerapan tata kelola keuangan di beberapa pura di wilayah Bali untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi teknologi digital dalam pengelolaan dana punia. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi, sementara itu, data sekunder diperoleh menggunakan studi dokumentasi dengan data yang berupa dokumen laporan keuangan pura, foto, arsip, dan catatan operasional pura, serta literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan Pura Tanah Kilap Denpasar berbasis teknologi digital, meliputi proses pencatatan, pelaporan, pengawasan, serta dampaknya terhadap kepercayaan krama. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi Keuangan Dana Punia

Dari hasil wawancara, transparansi di Pura Tanah Kilap melalui kebiasaan pengurus menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana punia dalam paruman maupun rapat pura. I Wayan Susila menjelaskan bahwa setiap menjelang dan sesudah piodalan, pengurus menyampaikan jumlah punia dan sesari yang diterima, rincian pengeluaran, serta saldo yang masih tersisa kepada umat. Secara teoritis, praktik ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap laporan penggunaan dana. Transparansi yang ditunjukkan pengurus pura menjadi mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara umat sebagai prinsipal dan pengurus sebagai agen, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Ketika umat memperoleh informasi yang cukup

mengenai aliran dana, potensi konflik kepentingan dan kecurigaan dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan kepada pengurus tetap terjaga.

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Dana Punia

Secara empiris, pencatatan dana punia di Pura Tanah Kilap dilakukan dengan menggunakan buku kas manual yang memisahkan antara penerimaan dan pengeluaran. Wayan Sanjaya memaparkan bahwa setiap selesai penghitungan sesari dan punia, nominalnya langsung dicatat berikut tanggal dan keterangan transaksi. Jika ditinjau dari konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan keagamaan, praktik pencatatan berbasis kas yang rutin dan didukung dengan pelaporan periodik sudah memenuhi unsur “*recording*” dan “*reporting*” yang esensial. Walaupun belum berbentuk laporan formal seperti neraca atau laporan aktivitas, adanya bukti tertulis dan rekap yang disampaikan kepada umat menunjukkan bahwa pengurus berupaya memenuhi kewajiban administratifnya. Hal ini sekaligus mengurangi ruang bagi manajemen laba atau penyalahgunaan dana karena setiap transaksi meninggalkan jejak dalam catatan.

Pertanggungjawaban Pengurus atas Penggunaan Dana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan dana punia di Pura Tanah Kilap tidak diputuskan secara sepihak, tetapi melalui proses musyawarah dalam paruman. Made Suara menegaskan bahwa setiap pengeluaran penting selalu dibicarakan bersama. Dalam perspektif teori keagenan, pola ini mencerminkan mekanisme “*accountability relationship*” antara agen dan prinsipal. Pengurus menerima mandat untuk mengelola dana punia, sementara umat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dilakukan secara kolektif dan terbuka dalam paruman mengurangi probabilitas perilaku oportunistik pengurus. Dari sudut pandang akuntabilitas keagamaan, praktik ini juga mencerminkan tanggung jawab etis dan spiritual, karena dana punia dipandang sebagai dana suci yang penggunaannya harus selaras dengan dharma dan keadilan bagi umat.

Mekanisme Pengawasan Internal dan Evaluasi

Pengawasan di Pura Tanah Kilap dilakukan secara berlapis. Pada tahap penghitungan sesari, beberapa prajuru hadir untuk memastikan jumlah yang dicatat sesuai dengan uang yang diterima. Secara teori, langkah-langkah ini menggambarkan adanya sistem pengendalian internal, meskipun sifatnya masih sederhana. Penghitungan bersama berfungsi sebagai kontrol fisik dan sosial, sedangkan rekonsiliasi dengan rekening bank merupakan bentuk kontrol administratif. Kedua mekanisme tersebut mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) dan kesalahan (*error*) yang sering muncul ketika hanya satu orang memegang seluruh otoritas keuangan. Dengan demikian,

pengawasan internal yang berjalan saat ini sudah mencerminkan prinsip check and balance dalam akuntansi sektor publik.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Dana Punia

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pura Tanah Kilap mulai memanfaatkan teknologi keuangan digital melalui penggunaan QRIS dan rekening tabungan di LPD, walaupun pencatatan internal masih manual. Dalam kerangka teori akuntabilitas modern, pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu bentuk inovasi tata kelola yang dapat meningkatkan transparansi, keandalan data, dan keamanan dana. Transaksi yang tercatat otomatis di sistem perbankan mengurangi risiko kehilangan fisik dan manipulasi, sekaligus menyediakan jejak audit (*audit trail*) yang lebih kuat. Meskipun belum terintegrasi dengan sistem pencatatan internal berbasis aplikasi, langkah awal penggunaan QRIS sudah menunjukkan arah transformasi menuju praktik akuntabilitas yang lebih terdokumentasi, sesuai dengan tuntutan digitalisasi sektor publik dan keagamaan. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan dana punia di Pura Tanah Kilap sudah tercermin melalui transparansi laporan dalam paruman, pencatatan kas harian, pertanggungjawaban kolektif pengurus, pengawasan internal, serta pemanfaatan QRIS dan rekening LPD, meskipun format laporan keuangan masih sederhana. Temuan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan keterbukaan informasi, keandalan pencatatan, dan mekanisme pertanggungjawaban agen kepada prinsipal sebagaimana dijelaskan dalam literatur akuntansi sektor publik dan teori keagenan. Praktik transparansi yang dilakukan pengurus dengan membacakan rekap penerimaan dan pengeluaran dana punia kepada umat sejalan dengan temuan Rozika (2021) bahwa transparansi pelaporan keuangan organisasi keagamaan menjadi sarana komunikasi untuk menjaga kepercayaan donatur meskipun laporan yang disusun belum sepenuhnya mengikuti standar formal.

Konsistensi pencatatan berbasis kas dan pelaporan periodik di Pura Tanah Kilap juga menguatkan hasil penelitian Junaedi dan Suswanta (2021) yang menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana publik sangat bergantung pada adanya dokumentasi transaksi yang tertib, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas organisasi keagamaan, praktik di Pura Tanah Kilap menunjukkan pola yang serupa dengan penelitian mengenai masjid dan lembaga keagamaan lain yang menyimpulkan bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang sederhana, bila disertai keterbukaan kepada jamaah, sudah mampu memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi dasar (Rozika, 2021; Safitri, 2024).

Pengawasan internal yang dilakukan melalui penghitungan bersama, rekonsiliasi dengan rekening LPD, dan pelibatan prajuru dalam pengambilan keputusan juga mengonfirmasi temuan

Aryawati (2022) serta Oktavia dan Mustika (2025) bahwa pembagian peran yang jelas dan adanya mekanisme kontrol sosial berbasis adat adalah elemen penting pembentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana adat dan dana keagamaan. Sementara itu, pemanfaatan QRIS dan rekening bank di Pura Tanah Kilap sejalan dengan penelitian tentang penerapan QRIS dalam dana punia yang menemukan bahwa teknologi digital dapat menjadi sarana pendukung akuntabilitas, meskipun peningkatannya tidak otomatis signifikan jika budaya pencatatan dan pelaporan sudah terlebih dahulu kuat (Yudiantara & Aryasita, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas di Pura Tanah Kilap secara umum telah berjalan cukup baik dan konsisten dengan temuan penelitian terdahulu, namun masih memiliki ruang penguatan terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur mengikuti pedoman standar akuntansi organisasi nirlaba seperti yang disarankan oleh studi-studi terkini mengenai keuangan organisasi keagamaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi digital khususnya penggunaan QRIS, aplikasi pencatatan keuangan, dan sistem pembayaran nontunai memberi peluang besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pura, baik dari sisi akurasi pencatatan, kecepatan pelaporan, maupun kemudahan akses informasi bagi krama. Namun, kemungkinan manfaat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penerimaan pengguna sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan di kalangan pengurus pura. Pada aspek transparansi, pengawasan, akuntabilitas, dan kendala dalam tata kelola keuangan Pura Tanah Kilap telah berjalan cukup baik meskipun masih sederhana, dimana transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan dana punia secara terbuka dalam paruman, pengawasan dilakukan secara kolektif melalui keterlibatan prajuru dan pencocokan dengan rekening LPD, serta akuntabilitas tercermin dari adanya pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada umat. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan yang masih manual, serta adaptasi terhadap teknologi digital yang belum optimal, sehingga secara keseluruhan diperlukan penguatan sistem berbasis digital agar tata kelola keuangan menjadi lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan.

Penelitian ini mempunyai beberapa saran, yakni penelitian yang akan dilaksanakan perlu mengelaborasi lebih dalam konstruk TAM (*perceived usefulness* dan *perceived ease of use*) ke dalam pedoman wawancara, sehingga faktor penerimaan teknologi di kalangan pengurus pura dapat tergambarkan secara jelas dan sistematis. Selain itu, pengurus pura disarankan mulai

Daftar Pustaka

- 163 | Hita Akuntansidan Keuangan

- Kusumawati, N. (2024). Dampak Digitalisasi Bagi Efektivitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Akuntanografi: Journal of Accounting Research*, 1(1), 11-21.
- Pasaribu, W. S. B., Lubis, D., & Jailani, M. (2025). Praktik Doa Umat Hindu: Studi Pada Kuil Shri Mariamman dan Pura Agung Raksa Buana di Kota Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 170-184.
- Prasetya, W. A., & Puspita, P. (2025). Determinan Pengelolaan Keuangan Bumdes: Perspektif Transparansi Dan Akuntabilitas. *Borobudur Accounting Review*, 5(1), 43-54.
- Pryangan, W., Abbas, N., Hepriansyah, A., & Dharmawati, T. (2025). Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain: Kajian Sistematis Literatur. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(4), 206-233.
- Sedana, I. M., & Permana, I. G. Y. (2025). *Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pendidikan Agama Hindu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, F., Sekaryanti, N. N., Noiyo, S. D. U., & Widawati, R. (2024). Penerapan Prinsip PSAK 45 terhadap Pengelolaan Keuangan di Pura Girinatha Gorontalo: Perspektif Akuntansi Hindu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 333-343.
- Suprianto, S., & Delpia, R. (2025). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Agama Hindu. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 9(1), 190-201.
- Waty, E., Sulistiana, I., Siskawati, E., Judijanto, L., & Maghfur, I. (2023). *Akuntansi Digital: Transformasi Pembukuan Di Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widhi, I. G. A. G. W., & Sulindawati, L. G. E. (2021). Analisis Penerapan Quickresponse Indonesian Standard Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia Pada Pura Jagatnatha, Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(2), 425-435.